

Peran UMKM untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Wehelmina M.Ndoen^{*1}, Markus Bunga², Petrus E.de Rozari³, Jackline H. Lada⁴, Yonas F.Riwu⁵, Konstantia Amol⁶, Lidia Hartarti⁷

Universitas Nusa Cendana^{*1,2,3,4,5,6,7}

E-mail: wehelmina.ndoen@staf.undana.ac.id^{*1}

ABSTRAK

Keberadaan usahamikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. UMKM selama ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan UMKM berarti memperkuat bisnis di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis bagaimana peran UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten TTS. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di kabupaten TTS berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tolok ukur adanya peningkatan pendapatan masyarakat, mendapat dan menikmati pendidikan yang layak, memiliki perumahan yang layak serta dapat menikmati fasilitas kesehatan dengan baik. Disisi lain peran tersebut hanya dapat dinikmati masyarakat yang berada pada lingkup ibukota kecamatan dan kota Soe saja sedangkan masyarakat yang berada di pedalaman pedesaan kurang dapat merasakan peran UMKM tersebut karena terbatasnya sarana dan prasarana untuk menjangkau sampai ke desa-desa yang ada di kabupaten TTS. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya pembentukan UMKM sampai pada desa-desa agar dapat mendorong tingkat pendapatan masyarakat dan juga perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana

Kata kunci: UMKM; Kesejahteraan Masyarakat; Pendidikan; Kesehatan; Perumahan

ABSTRACT

The existence of micro, small and medium enterprises (MSMEs) is the largest part of the national economy, is the participation of the community in various sectors of economic activity. MSMEs have been proven to be a safety pole during the crisis, through the mechanism of job creation and added value, success in increasing MSMEs means strengthening business in the community. This study aims to find out and analyze how the role of MSMEs to improve the welfare of the community in TTS Regency. The method used is descriptive qualitative. The results of the study show that MSMEs in TTS Regency play a role in improving the welfare of the community with the benchmark of increasing community income, getting and enjoying decent education, having decent housing and being able to enjoy good health facilities. On the other hand, this role can only be enjoyed by people living within the district capital and Soe City, while people in rural areas are less able to experience the role of MSMEs due to limited facilities and infrastructure to reach villages in TTS Regency. The implication of this research is the need for the

establishment of MSMEs down to the village level to boost community income levels and also the need for improvements in facilities and infrastructure.

Keywords: MSMEs; Community Welfare; Education; Health; Housing

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Masyarakat lebih dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi.

Sebagaimana pemacu pembangunan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor mikro, Keberadaan usahamikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. UMKM selama ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan UMKM berarti memperkuat bisnis di masyarakat (Agustian, 2025). Hal ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi pemerintahan. Perkembangan UMKM merupakan proses yang sangat baik untuk

membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia sehingga meningkatkan perekonomian suatu negara.

Pengembangan UMKM ini harus menjadi salah satu prioritas. Hal ini karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, pendapatan, dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan yang struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. UMKM di Indonesia selain berperan sebagai penggerak serta pertumbuhan pembangunan ekonomi juga dapat menyelesaikan masalah pengangguran karena dapat menyediakan lapangan kerja yang luas (Prasetyo, 2008). Oleh karena itu semakin banyak UMKM maka semakin baik pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada lingkungan sekitar yang dapat menciptakan kesejahteraan. Menurut departemen Koperasi (2008) peranan UMKM dalam kegiatan ekonomi adalah pelaku utama dalam setiap aktivitas ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi regional, sumber inovasi dalam pasar dan kontribusi besar dalam neraca

pembayaran. Menurut Kadeni dan Srijani (2020) UMKM memiliki peranan yang cukup besar untuk masyarakat kurang mampu yaitu sebagai salah satu fasilitas untuk mengurangi kemiskinan, sebagai alat dalam proses pemerataan tingkat perekonomian masyarakat kurang mampu sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Dalam penelitian ini digunakan peran UMKM menurut Departemen Koperasi dengan menggunakan 4 indikator karena disesuaikan dengan kondisi perekonomian TTS.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang. Tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam. Menurut Rahman (2018) kesejahteraan masyarakat dapat diartikan keadaan seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai hakekat martabat sebagai makhluk hidup.

Sebelum dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaku UMKM harus memberikan pengembangan secara terstruktur supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik Kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendapatan, perumahan dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup memprihatinkan (Putri, 2020). Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 1. Jumlah Penduduk dan Garis Kemiskinan Kab. Timor Tengah Selatan
Sumber: BPS Kabupaten Dalam Angka, 2021. (Diolah)

Gambaran kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan selama tahun 2013-2020 dapat dilihat pada grafik. Jumlah penduduk miskin mengalami perkembangan fluktuatif hingga pada tahun 2020 mencapai 128.980 jiwa (27,49% dari keseluruhan).

Adapun perkembangan secara fluktuatif juga terlihat pada indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang pada tahun 2020 mencapai angka 5,86 untuk indeks kedalaman kemiskinan (lebih tinggi dari rerata Prov. NTT sebesar 4,15) dan 1,73 untuk Indeks Keparahannya (lebih tinggi dari rerata Prov. NTT sebesar 1,24).



Gambar 2. Indeks Keparahannya dan Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Sumber: BPS Kabupaten Dalam Angka, 2021. (Diolah)

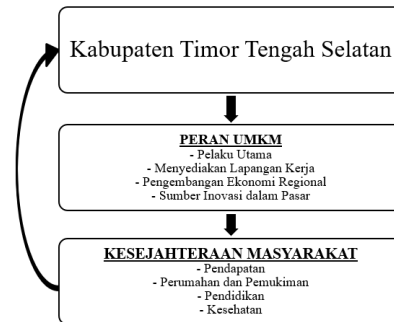
Gambaran diatas ditunjang dengan adanya 450 UMKM yang tersebar di kecamatan kecamatan yang ada di kabupaten TTS yang terdiri dari 90 industri meubel, 92 usaha menjahit, 135 usaha tenun ikat, usaha kuliner 122 unit usaha dll. Dengan keberadaan UMKM seperti ini seharusnya ikut berperan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat TTS. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran UMKM untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten TTS?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di kawasan itu akan diidentifikasi seluruh potensi dan persepsi masyarakat/ tentang peran UMKM guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dokumentasi. Jumlah sampel/informan belum bisa ditentukan, namun akan tergantung pada tingkat kejenuhan/kecukupan informasi yang didapat dengan pemetaan wilayah kecamatan disetiap kabupaten. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menyusun secara sistematis data/informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori untuk memudahkan dalam proses analisis dengan 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Kerangka Berpikir



Gambar 3. Kerangka Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan hasil dalam dua aspek yaitu secara makro dan mikro. Secara makro memberikan informasi hasil penelitian yang sifatnya makro terhadap indikator variabel penelitian yang ada yang terdiri atas :

A. Data Pendidikan

Tujuan pembangunan nasional sesuai amanah konstitusi adalah meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Erat kaitannya antara pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing sebagai aset penting dalam proses pembangunan. Sejalan dengan itu maka kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi yang dilaksanakan antara lain melalui penyediaan dan peningkatan fasilitas layanan pendidikan dan fasilitas pendukungnya. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6) melalui tingkat SD/ sederajat usia 7 – 12 tahun dan tingkat SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun.

Berikut beberapa indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten TTS sebagai cara untuk memotret kondisi kesejahteraan dari aspek pendidikan.

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Dua indikator yang digunakan adalah APK dan APM. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau lebih cepat bersekolah.

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2021 – 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5
SD/ Sederajat	96,13	98,00	114,01	116,16
SMP/ Sederajat	67,21	67,91	85,46	78,50
SMA/ SMK/ sederajat	55,32	54,44	78,40	79,35

Sumber: BPS Kabupaten TTS, 2023

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa proporsi siswa yang terlambat atau lebih cepat bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat sebesar (23,08 dan 24,91) lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang

pendidikan SMP/ sederajat (18,25 dan 10,59) dan SD/ sederajat (17,88 dan 18,16). Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang terlambat atau lebih cepat bersekolah pada pendidikan lebih tinggi lebih besar dibandingkan jenjang pendidikan dibawahnya. Hal ini juga menunjukkan kemampuan daerah ini dalam menyerap siswa (ketersediaan sekolah), kemauan dan motivasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar dan (apalagi) pendidikan yang lebih tinggi masih rendah. Rendahnya tingkat APM juga menunjukkan banyaknya siswa yang tidak naik kelas atau tingkat drop-out atau tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu, perlu ditingkatkan pemahaman pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan bagi anak-anak.

2) Kemampuan Baca-Tulis

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimal yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai kesejahteraannya. Kemampuan ini tercermin dari Angka Melek Huruf (AMH) yaitu persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin.

Tabel 4.4
Presentase Penduduk Kabupaten TTS 15 Tahun Keatas Menurut Kepandaian Membaca dan Menulis Huruf serta jenis Kelamin, Tahun 2020 – 2021

Kemampuan Baca-Tulis	2020	2021
1	2	3
Dapat Membaca dan Menulis		
Laki-Laki	89,99	89,92
Perempuan	87,66	87,59
Laki-laki Perempuan	88,77	88,70
Buta Huruf		
Laki-Laki	10,01	10,08
Perempuan	12,34	12,41
Laki-laki Perempuan	11,23	11,30

Sumber: Kabupaten TTS Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk Kabupaten TTS berumur 15 tahun keatas yang belum dapat membaca dan menulis (buta huruf) baik laki-laki maupun perempuan sampai dengan tahun 2021 dalam jumlah yang cukup besar yaitu

11,39%. Jika dibandingkan dengan NTT sebesar 6,15 dan Nasional sebesar 6,96. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, maka tingkat buta huruf pada perempuan di Kabupaten TTS ternyata lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini bisa menunjukan bahwa akses pendidikan dan pemberian kesempatan belajar pada perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki disebabkan faktor peran perempuan dalam keluarga, faktor budaya dan adat istiadat di daerah setempat yang dapat diteliti lebih lanjut.

3) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Derajat pendidikan masyarakat menentukan pola pikir dan pola tindak dalam meningkatkan derajat kesejahteraan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan lebih mudah menerima inovasi dalam kehidupannya ntuk mengubah derajat kesejahteraannya. Tingkat pendidikan masyarakat dilihat dari prosentase penduduk Kabupaten TTS yang berusia 15 tahun keatas berdasarkan jenis kelamin dan derajat pendidikan yang ditamatkannya.

Tabel 4.5
Prosentase Penduduk Kabupaten TTS Berusia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah yang dimiliki, Tahun 2022

Jenis Kelamin	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
1	2	3	4	5
Laki-laki	25,78	31,09	21,13	22,00
Perempuan	25,75	33,41	19,27	21,57
Laki-laki + Perempuan	25,77	32,25	20,20	21,18

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. TTS, 2022

Dari Tabel 4.5, menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah tertinggi paling banyak di TTS tahun 2022 adalah Ijasah Sekolah Dasar/ sederajat, kemudian tidak punya Ijazah SD, dan SMA/ sederajat. Sedangkan menurut jenis kelamin, Perempuan yang memiliki ijazah tertinggi Sekolah Dasar/ sederajat terbesar, tetapi pada

level pendidikan yang lebih tinggi prosentasenya menjadi lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan derajat pendidikan masyarakat Kabupaten TTS masih rendah dan perempuan lebih rendah pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Hal ini menggambarkan bahwa lebih banyak penduduk usia sekolah yang menempuh pendidikan SD/ Sederajat namun putus atau tidak bersekolah lagi di saat memasuki jenjang pendidikan SMP/ Sederajat dan seterusnya SMA/ Sederajat. Faktor-faktor yang bisa mengakibatkan hal ini antara lain: ekonomi keluarga, kesulitan mengakses sekolah dengan mutu yang diinginkan dan faktor kualitas serta kualifikasi mutu dari anak itu sendiri. Untuk jenjang pendidikan SMA/ Sederajat maupun pendidikan tinggi, memang masih juga dikarenakan kurangnya fasilitas dari Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi di kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga penduduk usia 7-24 tahun cenderung untuk menempuh pendidikan di luar kabupaten bahkan di luar provinsi.

4) Ketersediaan Lembaga Pendidikan

Keberadaan lembaga pendidikan yang berkualitas di suatu daerah penting untuk bisa menampung siswa yang dapat belajar mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya dari tingkat dasar sampai dengan tinggi. Berikut data jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah murid di Kabupaten TTS.

Tabel 4.6
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid pada Tingkat Dasar dan Menengah
Di Kabupaten TTS, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023

Jenjang Pendidikan	2021/2022			2022/2023		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
TK:						
Sekolah	28	177	205	28	190	218
Guru	88	398	486	88	381	468
Murid	835	4.093	4.928	885	4.918	5.803
SD :						
Sekolah	393	147	540	394	146	540
Guru	4.181	1.262	5.443	3.643	984	4.627
Murid	49.105	17.360	66.465	45.168	17.535	62.696
SMP:						
Sekolah	131	51	180	129	51	180
Guru	1.336	1854	2.127	1.854	511	2.365
Murid	24.979	23.846	32.857	23.846	7.374	31.220
SMA						
Sekolah	27	16	43	-	-	-
Guru	664	363	1.027	-	-	-
Murid	10.401	6.165	16.566	-	-	-
SMK						
Sekolah	-	-	-	19	15	34
Guru	-	-	-	415	211	626
Murid	-	-	-	3.637	3.313	6.950

Sumber: TTS dalam Angka, 2023

Tabel 4.6 menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara jenjang pendidikan dasar menuju ke jenjang menengah di Kabupaten TTS. Data ini membenarkan analisis sebelumnya, bahwa banyak anak di kabupaten ini yang “terpaksa” putus sekolah pada jenjang yang rendah menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka umumnya terjun ke dunia kerja di sector pertanian dengan kemampuan intelektual yang terbatas atau melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi ke luar daerah. Selain itu, peran sector swasta dalam mengelola pendidikan di kabupaten ini masih sangat besar. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mencari alternative solusi, baik untuk siswa yang putus sekolah atau siswa yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

B. Data Ekonomi dan Infrastruktur

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar

menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Tabel 4.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Timor Tengah Selatan Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lima Lapangan Usaha Terbesar, 2020 - 2022

No.	Lapangan Usaha	Kuantitas	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Milyar	3.504,69	3.681,32	4.019,75
		%	44,12	44,60	44,03
2.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	Rp. Milyar	1.287,21	1.251,71	1.256,76
		%	16,21	15,18	14,26
3.	Konstruksi	Rp. Milyar	685,70	753,64	805,01
		%	8,04	9,14	9,14
4.	Informasi dan Komunikasi	Rp. Milyar	573,65	598,17	627,16
		%	7,22	7,26	7,12
5.	Perdagangan besar dan Eceran, Reparatasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Milyar	474,57	504,93	566,15
		%	5,97	6,13	6,43
	PDRB Kab. TTS	Rp. Milyar	7.940,76	8.243,25	8.810,39

Sumber: PDRB Kab. TTS Menurut Lapangan Usaha, 2018 - 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa basis perekonomian di wilayah Kabupaten TTS berdasarkan lapangan usaha, masih bertumpu pada sektor pertanian sebagai sector primer daerah, namun demikian peran tersebut masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Dari kelima sektor unggulan tersebut, ternyata sektor perdagangan cenderung meningkat selama periode data. Tingginya peran sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial terkait dengan kebijakan pemerintah menggelontorkan program jaminan social dalam menghadapi kondisi krisis berupa pandemic Covid-19 yang melanda daerah pada periode tersebut.

Jumlah unit rumah di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum terdata. Namun jika diperkirakan berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka diperoleh jumlah unit rumah kurang lebih 68.089 unit. Pengembangan daerah yang potensial dalam pembangunan sektor perumahan dan permukiman masih fokus di daerah sekitar pengembangan Kota Soe. Pola permukiman di Kabupaten Timor Tengah Selatan menyebar, mengingat topografi yang bergelombang. Budaya bermukim masyarakat umumnya ditemui pada kawasan perbukitan dan kawasan sempadan pantai.

Status penguasaan bangunan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk bagian perumahan. Semakin banyak penduduk yang mempunyai rumah sendiri maka semakin banyak juga masyarakat yang tergolong mapan dan sejahtera terutama memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data pada buku statistik kesejahteraan Nusa Tenggara Timur tahun 2020, persentase kepemilikan bangunan tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah milik sendiri yaitu sebesar 96,06%. Berikut merupakan tabel persentase status penguasaan bangunan tahun 2018-2020 di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Luas lantai bangunan merupakan indikator lain yang menunjukkan kesejahteraan penduduk. Idealnya, sebuah keluarga harus menempati rumah dengan luas lantai minimal 8 kali jumlah anggota keluarganya. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, luas lantai yang mendominasi adalah 20-49 m² yaitu 55,86%. Akan tetapi masih terdapat 4,27% bangunan yang memiliki luas lantai dibawah 20 m².

Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (TTS)

Secara mikro penelitian yang dilakukan di kota Soe kab. TTS, peneliti mengambil 4 UMKM sebagai objek penelitian. Dari ke 4 objek UMKM yang diteliti, satu diantaranya merupakan UMKM milik kelompok dan tiga lainnya adalah milik pribadi.

Menurut Mulyono (2021): "UMKM kelompok adalah kumpulan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung dalam suatu kelompok atau asosiasi. Mereka memiliki kepentingan yang serupa dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam usaha mereka.

Keanggotaan dalam kelompok ini dapat memberikan manfaat, seperti akses ke sumber daya yang lebih besar, kesempatan berbagi informasi dan pelatihan, serta meningkatkan negosiasi dengan pihak lain."

Seperti halnya di kelompok UP2K Wanita Tani Sukamaju Desa Ajaobaki. Kelompok UMKM ini telah berdiri sejak tahun 2013 dan mengalami perkembangan yang cukup baik pada tahun 2017 karena mendapat pendanaan dari Bank NTT sekaligus menjadi salah satu UMKM binaan Bank NTT. Jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok ini adalah Tenun Ikat dan Pengolahan Cemilan dari Pangan Lokal.

Dalam usaha tenun ikat, kelompok ini memiliki pekerja sebanyak 20 orang namun anggota yang masih aktif hanya 15 orang. Sistem kerja dalam pengelolaan tenun ikat yaitu dilakukan dengan metode hybrid dimana ketika penenun (pekerja) mendapat modal awal dari kelompok untuk membeli bahan (benang tenun). Penjualan produk kain tenun yang telah jadi, akan dipajang di rumah kelompok untuk dijual. Sedangkan promosi produk tenun ikat dilakukan melalui media sosial dan melalui saluran TVRI Kupang.

Adapun hasil penjualan kain tenun tersebut akan diterima oleh penenun yang bersangkutan dan menyetor kembali modal serta sejumlah uang yang telah disepakati bersama sebagai tambahan kas kelompok dan diserahkan kepada ketua kelompok. Pendapatan bersih yang diterima oleh penenun bersifat fleksibel tergantung berapa banyak kain tenun yang diproduksi dan laku terjual. Pihak pihak yang mendukung UMKM tersebut adalah Bank NTT, Dinas UMKM (berupa pengadaan peralatan tenun ikat), Koprindag (dalam hal promosi dan penjualan

produk), dan dari Pemerintah Desa (berupa penggunaan dana desa untuk kegiatan pelatihan kepada masyarakat).

Selain tenun ikat, produk lain yang dikelola oleh kelompok UMKM ini adalah Produk Cemilan dari Pangan Lokal. Jumlah tenaga kerja yang mengelola produk cemilan berjumlah 12 orang. Sistem gaji yang diberikan kepada pekerja sebesar Rp 600.000,- per orang per bulan sedangkan gaji kasir sebesar Rp 700.000,- per bulan.

Biaya biaya yang dikeluarkan yaitu biaya listrik (sekaligus dengan pemakaian pribadi ketua kelompok, Rp400.000/bulan), biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pajak. Pendapatan kotor dalam sebulan mencapai 20-an juta.

Cara penjualan produk cemilan dilakukan dengan cara menyediakan stok barang jadi untuk dijual di rumah kelompok dengan kata lain Menunggu konsumen datang, Sistem titip; di Kupang, dan di (pusat ole ole Soe), serta penjualan cemilan ke Bank NTT Kupang sebanyak 400-500 bungkus per bulan. (dibayar tunai plus uang transportasi). Pihak pihak yang mendukung UMKM ini dalam pengelolaan cemilan adalah Dinas PMD, Koprindag dan Pemda (membantu dalam pemasaran), Dinas pertanian, dan Bank NTT (Bantuan mesin pengolahan). Reward yang diberikan kepada pekerja yaitu mengadakan liburan bersama di akhir tahun, memberi hadiah berupa pakaian baru pada saat hari hari besar keagamaan.

Dalam menjalankan usahanya, kelompok UMKM ini mengalami kendala dalam hal memasarkan produk (promosi dan penjualan) karena kurangnya keahlian dalam

menggunakan media sosial sebagai alat promosi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM dikabupaten TTS berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tolok ukur adanya peningkatan pendapatan masyarakat, mendapat dan menikmati pendidikan yang layak, memiliki perumahan yang layak serta dapat menikmati fasilitas kesehatan dengan baik. Disisi lain peran tersebut hanya dapat dinikmati masyarakat yang berada pada lingkup ibukota kecamatan dan kota Soe saja sedangkan masyarakat yang berada di pedalaman pedesaan kurang dapat merasakan peran UMKM tersebut karena terbatasnya sarana dan prasarana untuk menjangkau sampai ke desadesa yang ada di kabupaten TTS.

Disarankan agar pemerintah daerah agar terus memfasilitasi dan mendorong UMKM dalam pengembangan usaha sampai ke desa desa dan juga memperbaiki sarana dan prasarana seperti sarana transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustian, E. (2025). Implementasi Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Jambi*, 8 (1), 54-64.
- [2] Departemen Koperasi. (2008). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- [3] Dinas Kementrian Koperasi Indonesia. (2022). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2018-2019*. <https://kemenkopukm.go.id/uplo>

- ads/lap
oran/1650868533_SANDINGAN
_DA TA_UMKM_2018-2019
=.pdf
- [4] Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2),91.
<https://doi.org/10.25273/equilibri-um.v8i2.7118>
- [5] Mulyono, S. (2021). Strategi UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *Dampak Pandemi Terhadap*, 159.
- [6] Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *AKMENIKA UPY*, 2(1).
- [7] Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal of Economic Studies*, 4(2).
- [8] Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.